

**KERJASAMA PEMERINTAH DAN LSM PATTIRO DALAM PROGRAM
PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT SURAKARTA**

Oleh:

Rina Cahyaningrum

(14010110120052)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

Abstract

Surakarta is one of the city that offers the policy innovation in the realm of public service that includes education sector, health and community development. PKMS is one of the programs in the form of health care which is distributed to the public in Surakarta City in the form of aid outpatient treatment and hospitalization in general hospital of Surakarta and the health center or other designated hospitals. PKMS program management related to the division of labor is basically done by the Technical Implementation Unit (UPT) PKMS under the structure of Health Agency Surakarta City in accordance with the Local Regulation of Surakarta No. 6 of 2008 on the Organization and Administration of Local Government Surakarta City and Mayor Regulation of Surakarta number 20-K for 2009.

This study analyzed the cooperation between Surakarta City Government and NGOs Pattiro in Community Health program of Surakarta. The cooperation that performed is in the form involvement of NGOs Pattiro in the program Community Health Surakarta from planning, implementation and evaluation. The purpose of this study is to know the implementation, the factors that drive the success and perceived barriers in partnership.

In this study, researchers used a qualitative approach that will result in descriptive data. This study was conducted in Surakarta City. Data in this study was obtained through observations, interviews with Mrs. Ida Angklaita, SKM as head UPTD PKMS Surakarta Health Agency, Supriyanto.Skom as head of the TU

PKMS Surakarta Health Agency, sulatri, S.os as program staff of NGOs Pattiro Surakarta, Alif Basuki as staff Program Manager of NGOs Pattiro Surakarta, the media and the public are able to provide information, as well as the data obtained from the document.

Cooperation in Surakarta City Government and NGOs Pattiro in the program PKMS in the form program feedback mechanism between government of Surakarta City and NGOs Pattiro. The partnership uses the coordinate system that is run through partnership in discussions, seminars and workshops.

Keywords: Partnership, Implementation, PKMS Program

A. PENDAHULUAN

Dalam pencapaian pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah kebijakan publik mempunyai potensi yang sangat penting, untuk itu dalam pengelolaannya diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kebijakan publik merupakan strategi dan program dari pemerintah pusat atau daerah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi negara. Pelaksanaan kebijakan publik diperlukan dengan menggunakan mekanisme yang tepat sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Kunci dari keberhasilan kebijakan publik dapat dilihat dari implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan akan berhasil jika masyarakat dan pemerintah mempunyai kesadaran tinggi untuk bekerjasama dalam melaksanakan program pemerintah.

Sejak diberlakukannya UU No.32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah di berikan kekuasaan dan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola

daerahnya sendiri. Pada hakekatnya otonomi dapat berfungsi sebagai salah satu pemberdayaan daerah yang digunakan untuk merumuskan kebijakan serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu pemerintah berhak untuk menjamin segala bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup seluruh rakyat.

Inovasi kebijakan dapat diperlukan di daerah untuk meningkatkan kemampuan kebijakan dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat salah satunya dalam pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik akan menjamin keberhasilan pelayanan dan sebaliknya kualitas rendah kurang menjamin keberhasilan pelayanan publik. Keadaan semacam ini menyebabkan setiap negara berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.¹

Surakarta merupakan salah satu kota yang menawarkan inovasi kebijakan dalam ranah pelayanan publik yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Inovasi kebijakan di Surakarta mempunyai beberapa program diantaranya adalah Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPKMS), Pemeliharaan Kesehatan

¹ Ahmad Ainur Rohman, dkk, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang: Program Sekolah Demokrasi PlaCIDS Averroes dan KID, hlm.5.

Masyarakat Surakarta (PKMS), Sekolah Plus, Taman Pintar dan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).

PKMS adalah salah satu program dari Pemerintah Kota Surakarta berupa pemeliharaan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kesehatan Surakarta yang dapat disalurkan kepada masyarakat Kota Surakarta berupa bantuan pengobatan rawat jalan dan rawat inap di RSD Surakarta dan Puskesmas maupun rumah sakit yang telah ditunjuk. Program pemeliharaan pelayanan kesehatan ini meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk masyarakat pemegang kartu berobat berlangganan atau kartu PKMS.

Pemeliharaan kesehatan masyarakat Surakarta dinilai mengalami keberhasilan yang dapat dilihat dari kesuksesan dalam memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat Surakarta. Dengan menggunakan kartu PKMS, warga Solo mendapat bantuan pengobatan gratis, termasuk rawat inap (standar pelayanan Jamkesmas) di seluruh puskesmas dan 10 rumah sakit pemerintah atau swasta di Kota Solo.²

Keterjangkauan PKMS ini meliputi seluruh masyarakat Kota Surakarta yang telah memiliki kartu Gold dan Kartu Silver. Pelayanan kesehatan secara gratis dapat meringankan beban biaya warga surakarta

² Diakses dari <http://kompas.com>. Senin, 21 Maret 2011 Pukul 03:42 WIB

terutama untuk warga yang tergolong miskin. Jenis-jenis pelayanan kesehatan gratis yang dapat di berikan dari Puskesmas dan Rumah sakit yang telah ditunjuk untuk menjalankan PKMS kepada masyarakat Surakarta sesuai dengan aturan dan standart pelayanan yang telah disepakati. Pelayanan kesehatan gratis dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Surakarta. Dengan menggunakan kartu PKMS masyarakat kota Surakarta dapat berobat tanpa memikirkan biaya yang mahal dan berhak mendapatkan jaminan kesehatan.

Kebijakan publik di Kota Surakarta dijalankan dengan menggunakan sistem partisipatif yaitu bentuk kebijakan yang didalam prosesnya melibatkan masyarakat yang didalamnya terdapat LSM atau kelompok lain yang memiliki peran dalam mensukseskan kebijakan publik. Setiap kebijakan membutuhkan partnership baik dalam perencanaan maupun pengawasan yang dilakukan dengan menggandeng masyarakat atau swasta untuk menunjang keberhasilan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Partnership adalah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih atas dasar kesepakatan bersama untuk meningkatkan kapasitas tertentu dalam memperoleh hasil yang lebih baik.

Partnership dapat dilakukan baik oleh Pemerintah dengan swasta, masyarakat atau kelompok lain. PKMS adalah salah satu bentuk kebijakan yang dalam prosesnya menggunakan sistem partnership dan partisipatif. Peran masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang didalamnya termasuk juga LSM dapat memberikan pertimbangan kepada pemerintah kota

Surakarta dalam melaksanakan kebijakan. Permasalahan yang kemudian akan dibahas adalah bagaimana pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro dalam Program Pemeliharaan Masyarakat Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Kesehatan dan LSM Pattiro dalam program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta dan faktor-faktor penunjang keberhasilannya.

Teori yang digunakan peneliti dalam menganalisis data adalah konsep good governance dan kemitraan. Menurut Civius CSOs mempunyai peran dalam good governance yaitu :

- a. Menjadi mitra negara dan sektor swasta untuk mensejahterakan penduduk
- b. Pelaku dalam memberdayakan penduduk
- c. Sebagai Counter-Hegemony negara dan swasta

Model kemitraan yang dikembangkan berdasarkan atas azas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup ³:

- a. Kemitraan atas dasar penggabungan secara subordinatit (*Subordinate union of partnership*) yaitu kemitraan yang terjadi antara dua pihak atau

³ Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Kemitraan*, Yogyakarta : Gava Media, hlm. 131-132

lebih yang memiliki status atau kekuatan yang tidak seimbang antara satu dengan yang lain

- b. Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus (*Linier union of partnership*). Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran atau volume usaha atau organisasi, status atau legalitas
- c. Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linier (*Linier collaborative of partnership*). Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Hubungan kemitraan ini terjalin secara linier yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif juga sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data secara deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tertulis dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Sumadi Suryabrata metode deskripsi merupakan suatu prosedur yang dapat diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan baik subjek maupun objek

berdasarkan fakta-fakta yang tampak pada saat ini. Jadi di dalam penelitian ini, sumber-sumber yang diperoleh dari lapangan diolah sehingga dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa gambaran tentang pelaksanaan kerjasama pemerintah dan masyarakat.⁴

Analisa data dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data penelitian yang dapat menghasilkan data berupa deskriptif yang diperoleh dari informan baik lisan maupun tertulis. Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan, memilah, mensintesis, mencari, menemukan pola dan menemukan data yang penting.⁵

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti melakukan koreksi terhadap sumber data dan informasi yang kurang jelas yang diperoleh dari informan. Koreksi dapat ditanyakan secara langsung kepada pihak-pihak yang memiliki pengetahuan luas tentang penelitian ini, baik dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, LSM di Kota Suakarta dan masyarakat di Kota Surakarta yang memiliki informasi yang terkait dengan penelitian. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan perangkuman terhadap hasil

⁴ Sumardi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 16

⁵ Lexy J. Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 248

wawancara yang diperoleh dari dari informan terkait dengan penelitian yang dilakukan.

B. PEMBAHASAN

Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2004 mengatur tentang cara melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, berupa laporan atau pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut LSM Pattiro sebagai wakil dari masyarakat memberikan salah satu partisipasinya dalam bentuk pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan program PKMS di Kota Surakarta.

Kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama secara formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan kesepakatan kerjasama adalah suatu bentuk kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam kegiatan atau program tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan

Kemitraan juga dilakukan dalam program PKMS antara Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro. Adapun kemitraan ini terbentuk karena beberapa alasan yaitu sebagai berikut :

- a. Memiliki kesamaan visi dari masing-masing program antara Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro
- b. Posisi LSM Pattiro sebagai civil society yang memiliki hak untuk memberikan suaranya kepada Pemerintah Kota Surakarta
- c. Saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan dari masing-masing pihak baik dari Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro.

Partisipasi LSM Pattiro dalam penyelenggaraan program PKMS termasuk dalam tingkatan partisipasi kemitraan (partnership) yaitu masyarakat mengikuti proses pengambilan keputusan dengan pihak luar yang meliputi studi kelayakan, perencanaan, implementasi dan evaluasi.

Adapun kemitraan yang dilakukan antara LSM Pattiro dan Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Kesehatan yang membidangi PKMS adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Umpan Balik Program antara LSM Pattiro dan Pemerintah Kota Surakarta
- A. Dinas Kesehatan Surakarta sebagai pelaksana program PKMS Kota Surakarta

Ada beberapa keterlibatan LSM Pattiro dalam program PKMS yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu :

- a. Pembuatan Naskah Akademik Pemerintah Kota Surakarta di Bidang Kesehatan.

LSM Pattiro sebagai salah satu civil society di Surakarta tidak hanya terlibat dalam pelaksanaan program pelayanan kesehatan saja, termasuk didalamnya untuk program PKMS. LSM Pattiro secara aktif ikut serta dalam pembuatan kebijakan publik mulai dari perencanaan hingga evaluasi, tindakan LSM Pattiro tersebut sesuai dengan konsep good governance yaitu melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

- b. Aktivitas rutin Dinas Kesehatan Surakarta

Dinas Kesehatan Surakarta merupakan Dinas yang melaksanakan pengelolaan program kesehatan PKMS Surakarta. Untuk mencapai keberhasilan program maka Dinas Kesehatan memiliki aktivitas rutin seperti berikut yaitu :

1. Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan)
2. Diskusi terbatas dan Seminar
3. Diskusi lintas SKPD
4. Diskusi Lintas Kota

- B. LSM Pattiro sebagai partner pelaksanaan program PKMS Kota Surakarta

LSM Pattiro memiliki visi dan misi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan beberapa program pelayanan public di Kota Surakarta. Salah satu program pelayanan public yang memiliki kerjasama antara LSM

Pattiro dengan Pemerintah Kota Surakarta adalah program PKMS. LSM Pattiro memiliki beberapa program yang berkaitan dengan Program PKMS Kota Surakarta yaitu :

a. Program C-SIAP (Civil Society Initiativ Againt Poverty)

Program ini memfokuskan dalam bidang kesehatan, didalamnya termasuk PKMS. Dalam hal ini LSM Pattiro melihat keterbukaan transparansi dalam informasi pelayanan public di Kota Surakarta seperti dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam program C-Siap ini LSM Pattiro mengadakan musrengbang, seminar, audiensi, workshop dan diskusi lainnya dalam rangka melihat keterbukaan informasi pelayanan public.

b. Program EKOSOB (Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

Program EKOSOB adalah program yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2005. Program ini telah memberikan warna baru bagi hak asasi manusia di Indonesia. Selama ini HAM rentan terhadap isu-isu kekeasan, kriminalitas dan konflik. Pada hakekatnya hak-hak Ekosob adalah memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berhak memperoleh pelayanan termasuk didalamnya hak setiap orang untuk mencapaitaraf kesehatan yang tinggi.

LSM Pattiro melalui program ini berusaha berjuang untuk memenuhi hak-hak masyarakat Surakarta dalam memperoleh pelayanan kesehatan terutama untuk program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.

Program PKMS masuk dalam agenda atau kegiatan dari program Ekosob yang dilakukan oleh LSM Pattiro.

c. Program Pelayanan umum

LSM Pattiro dalam program pelayanan umum memfokuskan kepada mekanisme pelayanan public di Surakarta. Program ini membahas berbagai permasalahan yang berhubungan pelayanan kesehatan yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan solusi terbaik. Permasalahan pelayanan kesehatan PKMS sering kali berasal dari pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas yang melaksanakan program PKMS.

C. Inisiatif LSM Pattiro untuk menunjang keberhasilan kebijakan publik

Inisiatif merupakan suatu ide yang disampaikan kepada pihak yang bersangkutan untuk memberikan pemikirannya berhubungan dengan suatu hal. Untuk menunjang keberhasilan dari program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dalam hal ini. LSM Pattiro membantu Dinas Kesehatan dalam pemberian ide-ide sebagai berikut :

1. LSM Pattiro membantu memfasilitasi terbentuknya jaringan antar stakeholder untuk masalah-masalah publik tertentu di daerah

LSM Pattiro sejak tahun 2001 berusaha untuk membantu permasalahan yang ada di masyarakat Surakarta. Salah satunya dengan menciptakan forum komunitas warga yang ditujukan untuk masyarakat. LSM

Pattiro sebagai mitra kerja dari Pemerintah Kota Surakarta ikut serta membangun dan mengembangkan potensi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan dan pelayanan publik terutama dalam bidang kesehatan. Berkat adanya LSM Pattiro masyarakat menjadi lebih aktif untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pemerintahan di Surakarta. Hal yang dilakukan LSM Pattiro ini sesuai dengan misinya yaitu melakukan upaya-upaya mengembangkan jaringan komunikasi antar kelompok masyarakat dan stakeholders.

2. LSM Pattiro bekerja sama dengan Media di Surakarta

LSM Pattiro dalam melakukan pengawasan kebijakan kepada Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta bekerjasama dengan pihak Media di Surakarta. korelasi yang baik antara LSM Pattiro dan Media di Surakarta dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat. Inisiatif LSM Pattiro yang bekerjasama dengan Media untuk memberikan kritik kepada Pemerintah Kota Surakarta dan menyebarkan informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan bidang kesehatan dapat meningkatkan kualitas program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta.

3. Penciptaan Mobile Complain

Mobile complain adalah salah satu bentuk program dan kegiatan yang dilakukan oleh LSM Pattiro Surakarta sebagai bentuk partisipasinya kepada Pemerintah Kota Surakarta. Yang dimaksud dengan mobile complain ini yaitu pengaduan bergerak yang ditujukan kepada masyarakat untuk mengetahui segala bentuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Kegiatan LSM Pattiro ini juga membantu Dinas Kesehatan sebagai pelaksana program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta untuk mengurangi dan mengevaluasi kinerja dari program PKMS baik itu dalam hal Struktur Birokrasi maupun kualitas pelayanan.

Pelaksanaan kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro menggunakan teori tentang prinsip-prinsip kemitraan yaitu :

a. Prinsip Kesetaraan

Kemitraan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro berdasar atas asas kesamaan. Visi dan Misi Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro sama-sama bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Pelaksanaan kerjasama dalam program PKMS dilakukan secara berdampingan dan tidak terdapat tingkatan antara kedua belah pihak.

b. Prinsip Keterbukaan

Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Kesehatan dalam menjalankan kemitraan menekankan pada keterbukaan informasi dan transparansi pelayanan publik. Hal ini dapat dilihat pada saat diskusi dan seminar yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Surakarta, secara langsung Dinas Kesehatan Surakarta memaparkan informasi kepada stakeholder termasuk di dalamnya LSM Pattiro. Dinas Kesehatan merupakan salah satu Dinas di Kota Surakarta yang terbuka terhadap LSM Pattiro. Kritik, saran dan masukan secara terbuka diterima oleh Dinas Kesehatan Surakarta melalui pertukaran pendapat yang dijalankan pada saat diskusi. Keterbukaan ini menyebabkan kemitraan yang dijalankan antara Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro dapat berjalan dengan baik.

c. Prinsip Asas Manfaat Bersama

Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro dalam menjalin kerjasama dalam program PKMS mendapatkan keuntungan dari kontribusi masing-masing pada saat menjalankan kemitraan. Pemerintah Kota Surakarta mendapat keuntungan yaitu angka kesehatan masyarakat Surakarta semakin meningkat dan pelayanan dibidang kesehatan cenderung baik yang dapat dilihat dari kepuasan masyarakat Surakarta terhadap pelayanan kesehatan. Sedangkan bagi LSM Pattiro, dengan adanya kemitraan yang berbasas manfaat bersama pihak LSM mendapatkan keuntungan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki yaitu meningkatkan

partisipasi masyarakat Surakarta terhadap pelayanan PKMS dan mampu memberdayakan masyarakat Surakarta.

C. PENUTUP

C.1. Kesimpulan

Program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta adalah program murni dari Pemerintah Kota Surakarta. Dinas Kesehatan ditunjuk sebagai badan yang mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan program PKMS. Pelaksanaan Program Kesehatan Masyarakat Surakarta didukung oleh keterlibatan LSM Pattiro dalam beberapa aspek yaitu berupa pemberi solusi masalah PKMS dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pelayanan kesehatan Surakarta.

Kerjasama yang dijalankan antara Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro berjalan dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya Indek Pembangunan Manusia Kota Surakarta, kesehatan masyarakat Surakarta yang mengalami kenaikan dan angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Surakarta yang cukup baik.

Keberhasilan Program Pemeliharaan Masyarakat Kota Surakarta salah satu sebabnya di dukung oleh kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro. Proses pelaksanaan kerjasama yang dilakukan

yaitu dengan menggunakan sistem mekanisme umpan balik program baik program dari Pemerintah Kota Surakarta khususnya Dinas Kesehatan dan program dari LSM Pattiro.

Pola kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro dalam program PKMS dengan menggunakan pola koordinasi. Koordinasi dilakukan antara Dinas Kesehatan dan LSM Pattiro melalui diskusi-diskusi dan seminar yang dilakukan sesuai dengan kondisi program PKMS.

Kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro dalam program PKMS menyebabkan perilaku masyarakat Surakarta cenderung bersifat aktif yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya forum stakeholder di Surakarta. Kerjasama juga berdampak kepada perilaku birokrasi Pemerintah Kota Surakarta terutama untuk Dinas Kesehatan, rumah sakit dan puskesmas wilayah Kota Surakarta menunjukkan peningkatan pelayanan kesehatan, hal ini dibuktikan dengan peningkatan kepuasan masyarakat Surakarta mengenai pelayanan kesehatan.

C.2. Saran

Sesuai hasil penelitian dalam pelaksanaan kerjasama Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro Surakarta dapat direkomendasikan beberapa hal bagi Pemerintah Kota Surakarta dan LSM Pattiro yaitu :

1. Menciptakan kemitraan dengan swasta dan lembaga-lembaga sosial lainnya dengan cara membuka ruang partisipasi masyarakat yang secara rutin digelar di kota Surakarta
2. Menciptakan koordinasi yang dilakukan secara rutin melalui diskusi-diskusi dan seminar dalam lingkup Dinas Kesehatan Kota Surakarta , swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Koordinasi dilakukan tidak hanya pada saat program PKMS mengalami kendala namun ditentukan jadwal setiap bulannya.
3. Meningkatkan manajemen kesehatan yang transparan dan akuntabel melalui pendisiplinan dan pengecekan secara rutin yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta kepada rumah sakit dan puskesmas di Kota Surakarta.
4. Mengembangkan kualitas SDM kesehatan yang bermutu dengan memberikan pemahaman dan pengarahan langsung dari Dinas Kesehatan Surakarta kepada jajaran rumah sakit dan puskesmas di Kota Surakarta.
5. Peningkatan tenaga medis secara merata di puskesmas Kota Surakarta agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Ainur Rohman, dkk, 2008, *Reformasi Pelayanan Publik*, Malang:Program Sekolah Demokrasi PlaCIDS Averroes dan KID.
- Arikunto, Suharsimi. 2006.*Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2005.*Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Dwiyanto, Agus. 2009.*Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Goss, Sue. 2001.*Making Local Governance Work: Networks, Relationship and the Management of Change*. New York: Palgrave.
- J.Moleong, Lexy. 2008.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. 2002.*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Noor, Juliansyah. 2012.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Raminto, Atik Septi Winarsih. 2005.*Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S.Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005.*Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasmara Indonesia.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004.*Kemitraan dan Model-Model Kemitraan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suryabrata, Sumardi. 1998.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal :

Harsastro,Priyatno,Desentralisasi dan Kerjasama Pemerintah-Swasta,Dimuat di
Majalah Pengembangan Ilmu Sosial Forum Edisi 1 Februari 2012

Undang-Undang :

UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta
nomor 20-K tahun 2009

Internet :

Kuswidayanti.*Gambaran dan Organisasi di Bidang Kesehatan*. Diunduh dari
www.lontar.ui.ac.id. Diakses tanggal 24 Desember 2012 Pukul 11.43 WIB

<http://kompas.com>. 21 Maret 2011